

**IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN
APARATUR PEMERINTAH DESA DODAGA DI KECAMATAN WASILE TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**BOEL NGAJI
PATAR RUMAPEA
SONI ROMPAS**

Abstract: The purpose of this study was to determine the ability of government officials in the village of East Halmahera desa. Penelitian implementation of autonomy affairs is using qualitative methods. The government's ability village visits dar three indicators namely; education, training, and experience. Informants were taken from the village government elements Dodaga (village head and village secretary), in the village, the community leaders / religious / cultural. The total number of informants who were interviewed are as many as 8 people. Collecting data using interview techniques, while the data were analyzed using qualitative analysis interactive model of Miles and Hubernann.

The results showed: (1) Ability apratur village government Dodaga seen from indicators of education is quite good, but not optimally. (2) The ability of the government apparatus village seen from the indicators of training is not maximized because not breathing is done either from the village administration or support you e he Government area . (3) The ability of the government apparatus Dodaga seen from the village of indicator experience thus even this is not too maximal.

Based on these results ditarikked simpulan that the capacity of Government officials in the implementation of the affairs of the village of village autonomy in general has been running well but not maximum Deagan seen from indicators of education, training, and experience.

Based on the results of the research, put forward some suggestions to improve the government's ability to implement urusan otonomi Dodaga Rural villages, as follows: (1) The village government should be allocated sufficient budget to finance programs and activities. (2) The provision and improvement of infrastructure and facilities Dodaga village government work needs to be done; and (3) Employee / village government officials Dodagaperluditambah, and quality SD officials / employees also need to be improved through education, training and experience relevant / program pemberdayaan.

Keywords: Implementation of Village Autonomy in Delivering Government Apparatus Empowerment village.

Pendahuluan

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitan ini, Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara di dirikannya adalah untuk kemasalahatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang disadari bahwa negara belum sepenuhnya menjawab gumulan yang sudah sekian lama diidamkan oleh rakyat itu sendiri.

Lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa meyelenggarakan pemerintahan yang ada didesa menurut asas otonomi. Dalam hal ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan merintahan desa maupun fungsi pemerintahan yang lain seperti pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan

pembinaan masyarakat desa maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan yang optimal. Penyelenggara Pemerintahan Desa

diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparat pemerintah desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

desa semua aparat pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bekerja sama dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Desa Dodaga adalah sala satu desa dari (6) desa di Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. Desa ini memiliki luas wilaya 18.000, meter dan luas desa 1.864 meter /segi, dengan jumlah penduduk 1.806 jiwa dan desa ini dibagi dalam 10 lingkungan. Kabupaten Halmahera Timur memiliki kecamatan dan desa diantaranya: 1. Kecamatan Kota Maba memiliki (5) desa, 2. Kecamatan Maba memiliki 7 desa, 3. Kecamatan Maba Selatan memiliki enam (6) desa, 4. Kecamatan Maba Tengah memiliki delapan (8) desa, 5. Kecamatan Maba Utara, memiliki tujuh (7) desa, 6. Kecamatan Wasile memiliki enam (6) desa, 7. Kecamatan Wasile Selatan memiliki empat belas (14) desa, 8. Kecamatan Wasile Tengah memiliki delapan (8) desa, 9. Kecamatan Wasile Timur memiliki enam (6) desa, 10. Kecamatan Wasile Utara memiliki enam (6) desa, dengan total kecamatan sepuluh (10) dan desa tujuh puluh tiga (73) desa. Berdasarkan studi pendahuluan atau prasurevei yang dilakukan di desa dodaga nampaknya, implementasi otonomi desa dalam mewujudkan pemberdayaan aparat pemerintah desa belum optimal:Hal tersebut dapat ditunjukkan ada beberapa indikasi masalah antara lain, seperti koordinasi belum optimal terhadap instansi pemerintahan

(instansi otonom maupun instansi vertikal) yang ada di wilayah kecamatan penyelenggaraan pemerintahan desa juga ada indikasi belum optimal dalam hal ini pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat juga belum berjalan dengan maksimal.

Dari beberapa indikasi masalah tersebut diatas dapat menunjukkan bahwa Implementasi otonomi desa dalam mewujudkan pemberdayaan aparatur pemerintah desa belum optimal, hal ini dikarenakan rendahnya faktor kemampuan aparatur pemerintah desa sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa belum maksimal. Dengan demikian bahwa Aparat Pemerintah Desa adalah para penyelenggara pemerintahan di desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Namun sejauh mana kebenaran indikasi masalah tersebut masih perlu dianalisis melalui suatu penelitian ilmiah.

Oleh karena itu, dalam rangka penulisan skripsi penulis mengangkat judul penelitian: Implementasi Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau

penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam simbol- simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya. (Nanawi 1994:104-105)

Menurut *Dabbs* analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteks masing- masing, dan seringkali melukiskannya didalam kata-kata dari pada angka- angka (Faisal, 1999:256).

3.2 Definisi Konseptual Fokus Penelitian

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Implementasi Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Dodaga”

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah diharapkan orang yang memberikan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian oleh karena informan merupakan narasumber atau sumber (data primer/wawancara) yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Sekertaris Desa,

- b., Badan Perangkat Desa empat (4 orang)
- c. Badan permusyawaratan Desa dua (2 orang)
- d. Kepala Desa sebagai informan kunci (*key informan*).

Jumlah responden delapan (8) orang

3.4 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di desa Dodaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu diperoleh dengan cara mengadakan (wawancara) yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada fokus penelitian. Menurut Sugiyono dalam (Kaelan, 2014:119), mengatakan Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar pikiran dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian (Observasi langsung) dalam rangka untuk memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpulan data. Menurut Satori dalam (Kaelan,

2014:100), mengatakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif secara esensial adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, kondisi, konteks, ruang beserta maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun teknis analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992) seperti pada gambar di bawah ini.

Langkah-langkah analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan para informan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu..
- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
- d. rakhir dari analisis kualitatif.

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah te

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian sesuai dengan indikator pertanyaan adalah sebagai berikut:

- 1). Informan “ Rais Sarif ” (Kepala Desa Dodaga), mengatakan bahwa dalam satu tahun berjalan kami belum pernah melaksanakan pelatihan/program pemberdayaan aparatur pemerintah desa, sedangkan untuk tingkat professional aparatur pemerintah desa, memang sudah cukup baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan banyak hambatan dalam pemberdayaan aparatur pemerintah desa di antaranya, ada beberapa anggota aparatur pemerintah desa mempunyai latar belakang pendidikan masih rendah di antaranya SMP dan SMA, pengalaman kerja mereka juga masih kurang, sehingga tugas dan tanggung jawab yang saya berikan belum terlalu maksimal, kemudian sarana dan prasarana kantor desa kami juga belum memadai, dimana kami melaksanakan suatu pekerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ini sangat berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab kami sebagai memberikan pelayanan kepada masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Desa Dodaga

Pada tahun 1953 desa Dodaga didirikan. Dodaga diambil dari bahasa Tobelo yang diartikan Tujuan. Awalnya desa dodaga bagian dari desa akedaga. Tapi di karenakan adanya korban banjir yang kemudian memakan beberapa nyawa dari masyarakat setempat sehingga sebagian besar masyarakat berinisiatif meninggalkan desa akedaga dan membuat desa yang baru, yaitu Desa Dodaga.

4.2 Hasil Wawancara

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa fokus penelitian ini ialah Implementasi otonomi desa dalam mewujudkan pemberdayaan aparatur pemerintah desa. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian adalah sebagai berikut: Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman.

2). Informan “Elieser Huhutu” (Sekretaris desa) mengatakan bahwa profesional aparaturnya pemerintah desa dodaga memang sudah cukup baik namun belum maksimal karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana desa, tidak hanya itu adapun petugas pemerintah desa kami masih kurang pendidikan, pengalaman kerja. Sehingga tugas yang di berikan oleh kepala desa kurang maksimal atau tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kepala desa.

3). Informan “Abdurahman” (Bendes), mengatakan bahwa dalam satu tahun ini kami sudah melaksanakan program pembangunan desa, yang telah kami tetapkan sesuai dengan visi dan misi desa serta tuntutan dari masyarakat namun kami belum melaksanakan secara keseluruhan karena kami kasih keterbatasan anggaran desa sehingga dalam melaksanakan pembangunan desa hanya disesuaikan dengan anggaran yang ada.

4). Informan “Ari Alfons” (K.Umum) mengatakan bahwa : kinerja dan profesional aparaturnya pemerintah desa dodaga memang sudah cukup baik namun hal ini saya melihat tergantung pada tingkat kemampuan individu itu sendiri artinya yang di lihat dari hasil kerjanya sesuai dengan latar belakang pendidikan, latihan, dan pengalaman keahlian dengan keahlian yang dimiliki.

5). Informan “Rusmin Tan” (K. Pemerintahan) mengatakan bahwa tugas dan fungsi aparaturnya pemerintah desa memang sudah cukup baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari pimpinan desa,

kurangnya sarana/ prasarana desa, rendahnya tingkat pengalaman kerja serta kurang kedisiplinan waktu kerja.

6). Informan “Ismail Yusuf ”(K. Pembangunan) mengatakan bahwa profesionalitas aparaturnya pemerintah desa memang sudah cukup baik namun belum optimal, hal ini karena pemerintahan desa perlu diberdayakan baik itu dari segi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja pada bidang tertentu serta sarana dan prasarana juga perlu di benahi dan ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa.

7). Informan “ Zainal Soar ” (K. Dusun I) mengatakan bahwa sarana dan prasarana kantor desa memang kurang memadai. Hal tersebut yang digunakan satu unit computer, sedangkan listrik yang digunakan disel tiga kilo.

8). Informan “ Yordan Mitran ” (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa : fungsi dan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa memang sudah baik namun belum optimal . Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjanya, bimbingan dan pengawasan terhadap anggotanya.

Hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa aparaturnya pemerintah desa Dodaga memiliki kemampuan yang sudah cukup baik namun belum optimal. Dalam hal ini pendidikan, pelatihan, dan pengalaman aparaturnya pemerintah desa dodaga belum maksimal. Dengan demikian hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan aparaturnya pemerintah Desa Dodaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah cukup baik namun belum optimal.

4.3 Rangkuman Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Pemberdayaan aparatur pemerintah desa Dodaga hanya disesuaikan dengan tingkat profesionalitas aparatur pemerintah desa dari hasil pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja aparatur itu sendiri. Adapun indicator yang di maksud adalah:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah keseluruhan proses teknik metode belajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain. Dari hasil wawancara oleh peneliti dilaporkan bahwa pelaksanaan otonomi desa dalam mewujudkan kemampuan aparatur pemerintah belum maksimal. Dimana kemampuan aparatur pemerintah desa dilihat dari hasil pendidikan memang ada beberapa sudah cukup baik namun jika dilihat pelatihan dan pengalaman belum baik, bahkan ada aparatur pemerintah desa yang bersifat apatis terhadap tugasnya. Disinilah dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki tenaga yang profesional didalamnya, dengan memberikan pengembangan/pemberdayaan terhadap apatratur pemerintah desa tersebut.

b. Pelatihan. Pelatihan merupakan peningkatan ketrampilan kerja yang dibutuhkan untuk melaksanak Sesuai dengan hasil wawancara oleh peneliti dengan informan yang sudah ditentukan bahwa pelaksanaan otonomi desa dalam mewujudkan kemampuan aparatur pemerintah desa salah satunya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan desa terhadap anggotanya. Namun kenyataan dilapangan bahwa tugas dan tanggung jawab yang di berikan oleh kepala desa terhadap anggota kerjanya belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat disebutkan kurangnya tenaga professional aparatur pemerintah sehingga tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan tidak sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya salah satu informan mengatakan bahwa selama satu tahun berjalan pimpinan kepala desa saat ini kinerja kepala desa belum maksimal karena disebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan dalam memberikan pelatihan serta mengawasi proses jalannya kegiatan oleh aparatur pemerintah yang ada. Oleh karena itu beliau menyarankan bahwa perlu ditingkatkan adanya pemberdayaan aparatur pemerintah desa agar aparatur pemerintah desa mampu menjalankan tugas yang di berikan sebagaimana prosedur yang diatur oleh pemerintah desa.

c. Pengalaman

Menurut Siagian (1994 : 60) Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seorang dari peristiwa-peristiwa yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya.

Dari hasil wawancara oleh peneliti dilapangan bahwa imlementasi otonomi desa dalam mewujudkan pemberdayaan aparatur pemerintah desa belum optimal. Dimana para aparatur pemerintah desa belum memiliki kemampuan kerja, bahkan ada aparatur pemerintah desa yang bersifat apatis terhadap tugasnya. Disinilah dibutuhkan pemberdayaan/kemampuan aparatur pemerintah desa sebagai kekuatan dalam pelaksanaan otonomi desa didalamnya, dengan memberikan pemberdayaan melalui pelatihan, pendidikan, di sesuaikan dengan pengalaman kerja.

4.4 Pembahasan

Dalam bagian ini akan dianalisis semua data yang telah di peroleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan seperti yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992) sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan para informan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu..

- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan pegawai atau aparatur di luar kemampuan di bidang pekerjaan atau jabatan yang dipegang, sebab pendidikan pegawai dirancang atau disesuaikan dengan posisi baru, dimana tugas- tugas dilakukan memerlukan kemampuan khusus yang lain dari yang mereka miliki sebelumnya, dengan demikian tujuan pendidikan pegawai yakni untuk mempersiapkan pegawai dalam menempati posisi atau jabatan baru, terutama dalam bidang pengelolaan kepegawaian yang professional. Uraian tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya peranan pegawai atau aparatur sebagai sumber daya manusia dalam upaya mendukung keberhasilan organisasi pemerintahan

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa Pemberdayaan aparatur

pemerintah desa dodaga dalam pelaksanaan otonomi desa di Kecamatan Wasile Timur Kabupaten halmahera Timur belum berjalan dengan optimal. Dimana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pelayanan masyarakat belum optimal. Kemudian ada juga indikator dari Sedarmayanti (2003:106), tentang tenaga profesional. Dalam hal ini dilihat dari keahlian dalam bidang tertentu diperoleh dari hasil pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dengan demikian aparatur pemerintah desa Dodaga memiliki pemberdayaan /profesionalitas belum optimal.

5.2 Saran Bertolak dari hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran untuk dapat meningkatkan potensi/kemampuan aparatur pemerintah Desa Dodaga dalam hal implementasi otonomi desa, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah hendaknya dialokasikan anggaran desa yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih evektif membiayai program dan kegiatannya dalam pelaksanaan otonomi desanya.
2. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah desa dodaga perlu di sesuaikan mengingat kondisi sarana dan prasara yang dimiliki sekarang ini sangat kurang memadai.
3. Pegawai/aparatur pemerintah desa Dodaga kiranya dapat lebih ditingkatkan kualitas SD aparatur pemerintah desa dengan diadakan

pemberdayaan melalui pegembagan pendidikan, pelatihan, dan disertai dengan pengalaman kerja karena masih kurang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar Ujang. 2009 “*Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri*” Macanegara Jaya Cemerlang: Jakarta Barat.Faisal, Sanapiah, 1999. “*Format- format penelitian social*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hogwood, Brian W, dan Gunn, Lewis A. (1986). *Policy Analysis for the Real Worid*. Oxford Uversity Press..
- Hodgkinson, Chistoper. (1978) *Toward a Philosophy of Administration Basil Black Well*, Oxford.
- Kamus Webster, (dalam Solichin Abdul Wahab) *Analisis Kebijakan*, Cetakan ke 2 halaman 135 Jakarta: Bumi Aksara 2014.S
- Mazmania, Daniel, & Paul A Sabatier, (eds). (1981). *Effective Policy Implementation*. Lexington, Mass, D.C: Heath
- Majone, G. dan Aaron Wildavsk. (1978). *Imlementation as Efaluation, dalam policy Studies Review Annual*. Freeman (ed). Beverliy Hill: Sage.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nanawi, Dkk, 1994. “*Penelitian Terapan*” Gaja Mada University Press:Yokyakarta.

- Prijono, 1996, *Sumberdaya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pamudji, S. 1996, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Pranarka, dan prijono, Onny S, 1996. *Pemberdayaan konsep kebijakan dan implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Sedarmayanti (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, bandung:diterbitkan oleh PT Refika Aditama.
- Sarundjajang H. S. 2011 “*Babak baru sistim pemerintahan*” Kata hasta pustaka, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh (ed), (2004). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gaya Media, Yogyakarta,
- Siagian, S.P, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siswanto, 1988, *Administra pemerintahan* “Aksara Baru, Jakarta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Nawawi, Hadari, 2000. *Manajemen Stratejik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan (dengan ilustrasi Bidang Pendidikan)*, Gajah Mada ,Yogyakarta.
- Noor Juliansyah, 2013. “*Penelitian Ilmu Manajemen*” Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Suryaningrat Bayu Drs. 1981 “*Mengenal ilmu pemerintahan* “ Aksara Baru, Jakarta
- Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia. 1996. *Total Quality Management*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Tjiptoherianto, Prijono. 1993. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Prisma. Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha Drs. 1981. “*Dimensi-dimensi pemerintahan desa*” Bima Aksara, Jakarta
- Udoji, Chief J. O.(1981 . *The African public Servant as a Public Policy Maker, Public Policy in Africa, African Association For Public Administration and Management*. Addis Abeba.
- Van M, Donald S. dan Van Horn, Carl E Van. (1975). *The Policy Implementation Process*: Ohio State University.
- Widjaja, H. (2003). *Pemerintah Desa/warga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja HAW 2012 “*Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*” Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Wahab Abdul,(2004). *Analisis kebijakan cetakaan ke dua* jakarta : PT. Bumi Aksara

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Undang-Undang No: 6 Tahun 2014, *Tentang Desa.* Darma Bakti. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,

PP No.72 Tahun 2005 *tentang desa.*

Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 1999, *Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 *tentang Pokok Pemerintahan Daerah,* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 *tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 *tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 *tentang Desa Praja,*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 *tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah,*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah,* Undang-Undang